

**Implementasi Kebijakan Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan
Sertifikat Kelayakan Pengolahan di Unit
Pengolahan Ikan Palembang*****Implementation of Policy Requirements and Procedures for Issuing
Processing Feasibility Certificates in Palembang Fish Processing Units*****Maulindawati¹⁾, Arif Rahman Hakim^{2*)}, Konar Zuber³⁾**¹ Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ STISIPOL Candradimuka, Indonesia* Email correspondences: arif_rahman@stisipolcandradimuka.ac.id**ABSTRAK**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/Permen-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, Pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk menjamin produk perikanan aman dan memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, cara pengolahan ikan yang baik merupakan pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik. Sedangkan Prosedur Operasi Standar Sanitasi merupakan petunjuk dan proses penerapan sanitasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan wajib mengikuti SOP Sanitasi dan menerapkan cara pengolahan ikan yang baik di setiap unit pengolahan ikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan di Unit Pengolahan Ikan Palembang. Masalah dalam penelitian yaitu Lingkungan sarana pengolahan dan pengendaliannya, kondisi bangunan ruang pengolahan (*lay Out*) dapur pengolahan tidak memenuhi standar yang ditentukan, Rendahnya keinginan Unit Pengolah Ikan/Pelaku usaha dalam mengurus izin *Good Manufacturing Practices* (GMP) dengan alasan malas melengkapi persyaratan dan Pelaku usaha masih kesulitan untuk melakukan perbaikan- perbaikan yg sesuai standar *Good Manufacturing Practices* (GMP)/ *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) karena keterbatasan biaya/ anggaran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa: secara keseluruhan Implementasi Kebijakan Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan di Unit Pengolahan Ikan Palembang sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan/ kendala seperti Lingkungan sarana pengolahan dan pengendaliannya, kondisi bangunan ruang pengolahan (*lay Out*) dapur pengolahan tidak memenuhi standar yang ditentukan, Rendahnya keinginan Unit Pengolah Ikan/Pelaku usaha dalam mengurus izin *Good Manufacturing Practices* (GMP) dengan alasan malas melengkapi persyaratan serta Pelaku usaha masih kesulitan untuk melakukan perbaikan yg sesuai standar *Good Manufacturing Practices* (GMP)/*Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) karena keterbatasan biaya/ anggaran.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan**ABSTRACT**

Accordance with the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the RI Number 17/Permen-KP/2019 concerning Requirements and Procedures for Issuing Processing Feasibility Certificates, Guidelines and procedures for good fish processing to ensure fishery products are safe and meet the requirements for quality assurance and safety of fishery products,

methods Good fish processing is a guideline and procedure for good fish processing. Meanwhile, Sanitation Standard Operating Procedures are instructions and processes for implementing good sanitation to meet the needs for quality assurance and safety of fishery products. Fish Processing Industry Business Actors are required to follow Sanitation SOPs and implement good fish processing methods in each fish processing unit. The aim of this research is to determine the implementation of the Policy Requirements and Procedures for Issuing Processing Feasibility Certificates in Palembang Fish Processing Units. The problems in the research are the environment of the processing facilities and their control, the condition of the processing room building (lay out) of the processing kitchen which does not meet the specified standards, the low desire of the Fish Processing Unit/Business Actor in obtaining a Good Manufacturing Practices (GMP) permit for the reason that they are lazy in completing the requirements and the actors Businesses still have difficulty making improvements that comply with Good Manufacturing Practices (GMP)/ Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) standards due to cost/budget limitations. The data analysis technique used in this research is a qualitative data analysis technique. This research shows that: overall the implementation of the Policy on Requirements and Procedures for Issuing Processing Feasibility Certificates in the Palembang Fish Processing Unit has been implemented properly, although in its implementation there are still obstacles/constraints such as the environment of processing facilities and their control, the condition of the processing room building (lay out).) processing kitchens do not meet the specified standards, low willingness of Fish Processing Units/business actors to obtain Good Manufacturing Practices (GMP) permits for reasons of being lazy in completing the requirements and business actors still have difficulty carrying out repairs that comply with Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation standards Standard Operating Procedures (SSOP) due to cost/budget limitations

Keywords: Implementation, Policy, Procedures for Issuing Processing Eligibility Certificates

PENDAHULUAN

Perikanan adalah suatu usaha pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Kegiatan ini memberikan kontribusi cukup besar dalam penyediaan pangan dan gizi bagi masyarakat luas khususnya di Indonesia. Salah satu daerah yang sebagian besar terdiri dari perairan adalah Sumatera Selatan. Perairan umum dan perikanan laut merupakan sumber utama produksi ikan. Hal ini menunjukkan potensi pengembangan produksi perikanan di Sumsel untuk budidaya ikan air tawar di berbagai daerah, termasuk perkotaan Palembang.

Citra yang kurang baik terhadap teknologi pengolahan ikan tradisional biasanya dikaitkan dengan hal tersebut, antara lain rendahnya sanitasi dan higiene, rendahnya kualitas dan kesegaran bahan baku, serta cara pengolahan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Menurut Heruwati (2002), keamanan pangan tidak dapat dijamin, dan bisnis biasanya dijalankan oleh keluarga dengan sedikit pengalaman manajerial.

Situasi ini dapat diperbaiki dengan menggunakan teknik pengolahan yang tepat dan mengikuti prinsip-prinsip sanitasi dan higienis yang baik, khususnya Praktik Pengolahan Ikan yang Baik (GMP) dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi. Pelaku usaha di bidang pengolahan ikan harus memenuhi SOP sanitasi dan menerapkan praktik pengolahan ikan yang baik di setiap unit pengolahan ikan. Tugas penanganan ikan dan/atau pengolahan ikan dilaksanakan oleh unit pengolahan ikan. Penerapan praktik pengolahan ikan yang baik di fasilitas pengolahan ikan memerlukan :

- a. Seleksi Bahan Baku;
- b. Penanganan Ikan dan Pengolahan Ikan;
- c. Penanganan dan penggunaan bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan kimia;

- d. Pengemasan;
- e. Penyimpanan

Sedangkan Pemenuhan persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi mencakup:

- a. Keamanan di sekitar air dan es;
- b. Keadaan dan kerapian permukaan yang disentuh makanan
- c. Menghindari kontaminasi silang;
- d. Selalu memperbarui tempat pencuci tangan, sanitasi, dan toilet;
- e. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan;
- f. Menggunakan, menyimpan dan memberi label bahan kimia berbahaya;
- g. Pengawasan terhadap keadaan dan kesehatan karyawan;
- h. Pengendalian hewan yang menimbulkan masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan fasilitas pengolahan dan pengelolaannya, serta tata letak dan kondisi bangunan (*lay Out*) dapur pengolahan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan
- b. Rendahnya keinginan Unit Pengolah Ikan/Pelaku usaha dalam mengurus izin *Good Manufacturing Practices* (GMP) dengan alasan malas melengkapi persyaratan

1. Komunikasi

Hal ini berdampak besar pada tercapai tidaknya tujuan penerapan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil keputusan melakukan hal ini.. Mereka tahu apa mereka lakukan. Jika komunikasinya baik, pengetahuan tentang apa yang mereka lakukan bisa

- c. Pelaku usaha masih kesulitan untuk melakukan perbaikan- perbaikan yg sesuai standar *Good Manufacturing Practices* (GMP)/ *Sanitation Standard Operating Procedures* (SSOP) karena keterbatasan biaya/ anggaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Gother (1996: 230) menegaskan bahwa kebijakan public secara jhusus terkait dengan tujuan yang telah diputuskan melalui proses politik yang dilakukan oleh seluruh atau sebagian masyarakat dibawah lingkup pemerintahan tertentu.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

George C. Edward III (dalam Islamy: 1996: 65),), tahapan implementasi proses pengambilan kebijakan terjadi di antara tahapan perumusan kebijakan dan hasil atau dampak yang mengikutinya. Proses penerapan suatu kebijakan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berhubungan, seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

Model kognitif dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Islamy: 1996: 65) :

efektif, sehingga mereka harus diberi tahu tentang semua keputusan kebijakan dan aturan penegakan hokum (atau peraturan penegakan hukum) akan dilaporkan ke bagian personalia yang bertanggung jawab

2. Sumber Daya

Edward III dalam Agustino (2012:151) Salah satu unsur penyusun indikator sumber daya adalah sumber daya manusia, informasi, kewenangan dan fasilitas.

3. Disposisi

Sikap atau disposisi adalah tingkat kecenderungan yang disukai atau tidak disukai terhadap obyek psikologi. Objek psikologis. Disini objek psikologis mencakup hal-hal seperti simbol, slogan, orang, tempat, ide, simbol dan sebagainya (Ahmadi, 1999:163).

4. Struktur Birokrasi

Badan organisasi yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan public dalam suatu struktur pemerintahan disebut mempunyai struktur birokrasi. Fungsi utamabirokrasi adalah memfasilitasi pelayanan publik dan berfungsi sebagai alat pengawasan.

Definisi Komseptual

Definisi konsep adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa, keadaan yang melibatkan sekelompok orang, atau kasus individu yang menjadi focus ilmu social (Singarimbun dan Effendi, 1995:32). Konsep penelitian ini didefinisikan sebagai berikut berdasarkan definisi konsep :

- a. Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan yang diambil oleh orang-orang (dan kelompok) disekitar public dan swasta dengan tujuan mencapai prioritas yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.
- b. Dari bahan mentah ikan hingga produk jadi untuk konsumsi manusia, terdapat

berbagai proses yang terlibat dalam pengolahan ikan.

- c. Kelayakan Pengolahan berarti ketaatan pada prinsip dasar pengolahan, meliputi konstruksi, tata letak, higienis, pemilihan bahan baku, dan cara pengolahan.
- d. Sertifikat Kelayakan Pengolahan atau yang disebut juga SKP, diberikan kepada pelaku usaha untuk setiap fasilitas pengolahan ikan yang telah menerapkan tehnik pengolahan ikan yang baik dan memenuhi Prosedur Operasi Standar Sanitasi
- e. Implementasi Kebijakan Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan di Unit Pengolahan Ikan Palembang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Unit Pengolahan Ikan Palembang yang difokuskan pada sejumlah kegiatan terkait pedoman dan prosedur Pengolahan Ikan serta pelaksanaan yang baik, sanitasi untuk memenuhi persyaratan jaminan dan mutu dan keamanan produk perikanan

METODE PENELITIAN

Tesis ini disusun melalui penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dipadukan dengan metode penelitian deskriptif. Tiga metode yang digunakan untuk pengumpulan data : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data adalah analisis data kualitatif dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana dalam Mudir (2016), yaitu: pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Definisi operasional

Definisi operasional merupakan pedoman fungsional untuk mengukur suatu variabel dalam kaitannya dengan cara variabel tersebut diukur (Singarimbun dan Effendi, 1995: 46). Diukur dengan model implementasi kebijakan dari *George C. Edwards* (Tangkilisan, 2003:11-12) dengan indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi
 - a. Transmisi
 - b. Kejelasan
 - c. Konsistensi
2. Sumber Daya
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Informasi
 - c. Wewenang
 - d. Fasilitas
3. Disposisi / Sikap
 - a. Tanggung Jawab
 - b. Disiplin
 - c. Integritas
4. Struktur Birokrasi
 - a. Mekanisme Kerja/SOP
 - b. Fragmentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi telah dituangkan secara jelas dalam Kebijakan Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan di Unit Pengolahan Ikan Palembang . Hal ini ditunjukkan dengan penerapan yang disebarkan kepada seluruh pihak terkait, termasuk staf dan kelompok sasaran kebijakan, yaitu pelaku usaha pengolahan ikan.

b. Kejelasan

Informasi yang diberikan mengenai Kejelasan dapat dipahami oleh para pelaku usaha di setiap unit pengolahan ikan, hal ini menunjukkan hal tersebut.

c. Konsistensi

Konsistensi persyaratan kebijakan dan prosedur penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan telah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari Komunikasi yang secara konsisten disampaikan oleh Unit Pengolahan Ikan Palembang sesuai dengan apa yang telah diputuskan atau tertuang dalam kebijakan mengenai cara pengolahan ikan yang baik dan standar operasional prosedur yang berbasis pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nomor 17/Permen-KP/2019 Perikanan RI tentang Syarat dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sudah cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. . Hal ini terlihat dari tingginya kualitas sumber daya manusia yang digunakan, yang seluruhnya telah mengenyam pendidikan dan pelatihan baik berupa pendidikan maupun magister. Sedangkan sumber daya manusia yang terlibat berjumlah tujuh orang, antara lain Dinas Provinsi, Penyuluh Perikanan, Direktur PBM, Kepala Dinas, Lembaga Penilaian Kesesuaian/Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dan Kepala Dinas. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

b. Informasi

Berdasarkan temuan penelitian, Kelompok Pengolah dan Pemasar (poklahsar) hasil kelautan dan perikanan serta pelaku usaha kelautan dan perikanan Kota Palembang mempunyai akses informasi yang cukup jelas untuk memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

c. Wewenang

Unit Pengolahan Ikan Palembang telah benar menjalankan kewenangan yang tertuang dalam Kebijakan Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Hal ini ditunjukkan dengan kewenangan khususnya dengan pemeriksaan Menteri Kelautan dan Perikanan RI melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing. Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang diteruskan ke Unit Pengolahan Ikan Palembang. Wewenang pengawas mutu kepada pelaku usaha atau unit pengolahan ikan adalah melakukan verifikasi lapangan dengan mengamati atau memverifikasi penerapan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur Standar Sanitasi dan dituangkan dalam laporan hasil verifikasi. , yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai dan dilaporkan dalam laporan hasil verifikasi. dan pilih posisi Sertifikat Kelayakan Pemrosesan.

d. Fasilitas

Fasilitas yang ada antara lain aula, laptop dan printer, internet, meja, kursi, proyektor, flashdisk, sepatu boot, pakaian kerja, dan alat tulis. Penerapan GMP dan SSOP di

Palembang dianggap memadai dan berhasil.

3. Disposisi/Sikap

a. Tanggung Jawab

Setiap pelaku usaha/unit pengolahan ikan bertugas melaksanakan praktik manufaktur yang baik (GMP) dan prosedur operasi standar sanitasi (SSOP) yang telah ditetapkan dan siap menyampaikan laporan setiap satu (satu) tahun sekali atas barang yang sertifikat kesesuaian pemrosesan telah diterbitkan. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan sempurna.

b. Disiplin

Disiplin penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Standard Operating Procedures (SSOP) pada Unit Pengolahan Ikan Palembang untuk menghasilkan produk berkualitas yang aman dikonsumsi, dapat ditelusuri, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan dalam proses, yaitu serangkaian kegiatan pemeriksaan mutu yang dilakukan secara berkala, berkala, dan berkesinambungan untuk memastikan produk perikanan mempunyai mutu yang baik dan aman dikonsumsi. Namun dalam hal penegakan disiplin, pelaku usaha masih kesulitan untuk melakukan perbaikan sesuai standar Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) karena keterbatasan sumber daya atau karena anggaran yang belum dilaksanakan dengan baik.

c. Integritas

Fasilitas pengolahan ikan dan pelaku usaha wajib menerapkan SSOP dan GMP dengan penuh komitmen dan integritas. Kebijakan persyaratan Unit Pengolahan Ikan Palembang dan tata cara penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun komoditas perikanan harus aman dikonsumsi dan bermutu tinggi. Hal ini mencakup segala sesuatu mulai dari bahan mentah hingga peralatan, infrastruktur (gedung dan sekitarnya), proses produksi, dan pengemasan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masih banyaknya Pelaku Usaha Pengolahan Ikan yang masih melanggar Standar Operasional Prosedur Sanitasi (SSOP) sebagaimana telah dicanangkan. Permasalahan lainnya meliputi keadaan ruang pengolahan dapur (tata letak bangunan) dan sekitarnya, serta pengendalian fasilitas pengolahan. Prosedur Operasi Standar (SOP) sanitasi tidak dipatuhi selama pemrosesan.

4. Struktur Birokrasi

a. Prosedur atau mekanisme kerja/ SOP

Kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kerja/ SOP yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/Permen-Kp/2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi terkait penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah pembagian tugas pokok dan

fungsi dari Unit Pengolahan Ikan Palembang sudah cukup jelas dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, penerapan Kebijakan telah berjalan dengan lancar. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi, antara lain lingkungan tempat fasilitas pengolahan beroperasi dan pengendaliannya, tata letak dapur pengolahan yang tidak memenuhi standar, serta kondisi pelaku usaha dan unit pengolahan ikan. rendahnya kemauan untuk mengajukan izin Cara Pembuatan Obat yang Baik (GMP) karena lamban dalam memenuhi persyaratan. Selain itu, para pelaku usaha terus berjuang untuk melakukan perbaikan sesuai standar GMP/Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP). Karena keterbatasan finansial. Berikut rinciannya untuk informasi lebih lanjut:.

1. Komunikasi telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, dilihat dari transmisi, kejelasan dan informasi
2. Sumber Daya, sudah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, dilihat dari sumber daya manusia, sosialisasi, wewenang dan fasilitas.
3. Disposisi/ sikap, sudah dilaksanakann dengan sebagaimana mestinya, dilihat dari tanggung jawab, dan disiplin. Sedangkan dari segi integritas masih terdapat hambatan.
4. Struktur Birokrasi, dalam hal mekanisme/ SOP dan fragmentasi telah diterapkan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (1999). *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Anderson, J.E. 1978. *Public Policy Making*. Holt Rinehart And Windton: Newyork
- Budiarjo, Meriam. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Putaka
- Cangara, Hafied. 2000. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dida, S., Damayanti, T., & Koswara, A. (2021). *Representasi Indonesia pada penanganan COVID-19 di media asing*. 5(2), 186–207.
- Fahmi, Ali. 2003. *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir dalam Upaya Meningkatkan PAD*. Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang: Ilmu Administrasi Negara
- Lewis A. Gunn and Brian W. Hogwood. 1983. *Policy analysis for the real world*. Oxford : Oxford University Press
- Hadiwardoyo, W., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Barat, J. (n.d.). *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*. 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hoogerwerf. 1983. *Isi dan Corak-corak Kebijakanaksanaan*. Jakarta: Erlangga
- Islami, M. Irfan. 1994 dan 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Isworo, Waluyo Iman. 1996. *Beberapa Pendekatan dan Analisis dan Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lineberri, Robert. 1978. *American Public Policy*. North Wetern University Harpen And Row. Newyork
- Mazmanian, Daniel dan Sabartier, Paul. 1993. *Implementation And Public Policy*. USA: Forsman And Company
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Muhammad Fachrurrozi Anwar. 2021. *Efektivitas Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Dalam Pengelolaan Ikan Di Kota Ambon Provinsi Maluku*. Maluku: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.